



OPERASI PENYELENGGARAAN PEPERANGAN KEPULAUAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI INDONESIA

Yogo Prasetyo, Angga Faris Saputra, S Supartono

Progam Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional

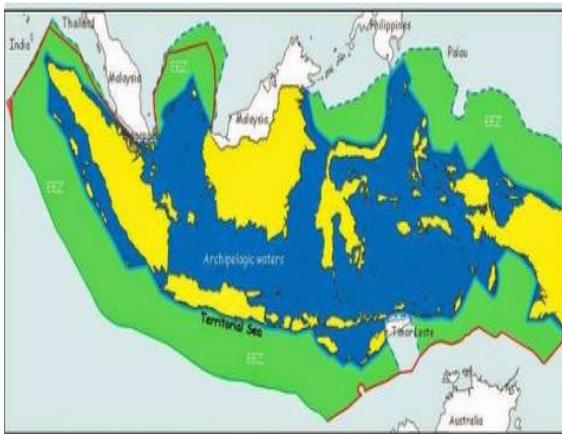
Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas tentunya memiliki wilayah ruang terbuka (laut) yang berbatasan dengan negara lain Dalam perspektif pertahanan, kondisi ini membuka potensi ancaman dari berbagai arah, khususnya pada choke point. Dengan wilayah laut yang sangat luas, jelas NKRI membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang banyak, proposional dan modern. Kondisi perairan Indonesia, baik ditinjau dari geostrategik, geopolitik, maupun geoekonomi memiliki peran sangat penting dalam pertahanan nasional. Maka salah satu strategi untuk mewujudkan pengendalian laut secara utuh ialah dengan menyelenggarakan operasi peperangan kepulauan. Tujuan dari penulisan ini untuk memeberikana referensi penyelenggaraan peperangan kepulauan dengan memanfaatkan konstelasi dan kondisi geografis Indonesia. Peperangan Kepulauan didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah yuridiksi nasional Indonesia dengan memanfaatkan serta mensinergikan karakteristik geografi dan hidro-oseanografi negara kepulauan dengan teknologi kesenjataan yang tepat guna menciptakan keunggulan bagi kekuatan sendiri. Dalam konteks peperangan laut, maka gelar operasi tempur laut diarahkan untuk menerapkan taktik peperangan kepulauan yang sesuai dengan kondisi geografi maritim, hidro-oseanografi perairan dan meteorologi agar mampu mewujudkan pengendalian laut dan corong-corong strategis secara mutlak.

Kata Kunci: Operasi, Penyelenggaraan, Peperangan Kepulauan, Strategi Pertahanan Laut

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah laut, maka konsekuensi logisnya adalah Indonesia dikelilingi oleh ruang terbuka berupa laut yang berbatasan dengan negara lain (Keliat, 2009). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Peta Maritim Indonesia

Dalam perspektif pertahanan, kondisi ini membuka peluang datangnya ancaman dari berbagai arah, khususnya dari daerah corong-corong strategis (*choke points control*) (Bueger, 2015). Oleh karena itu, secara logis media laut merupakan *center of gravity* dari pertahanan Indonesia yang intinya mewujudkan pengendalian laut (*sea control*) secara utuh. Dengan wilayah laut yang sangat luas, jelas Indonesia membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang banyak, proposional dan modern.

Kondisi perairan Indonesia, baik ditinjau dari geostrategik, geopolitik, maupun geoeкономи memiliki peran sangat penting bukan saja bagi Indonesia, namun juga bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik bahkan global. Postulat (dalam Rahman, 2015) mengatakan bahwa geografi merupakan faktor fundamental yang mendasari pembangunan suatu sistem pertahanan. Implementasinya terhadap konstelasi dan kondisi geografi

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sistem pertahanan laut Indonesia secara kumulatif dibentuk dari sub-sub sistem pertahanan sesuai karakter bagian wilayah perairan, sehingga dengan memanfaatkan kondisi, konstelasi dan sumber daya yang ada, penyerangan dan pertahanan menjadi tepat guna serta tepat sasaran.

Indonesia sebagai negara kepulauan maka konsekuensi logisnya adalah kekuatan angkatan lautnya harus mencerminkan postur TNI AL yang mampu menanggulangi setiap ancaman yang datang melalui laut, khususnya pada corong-corong strategis (*choke points control*) (Al Syahrin, 2018). Namun dengan berbagai keterbatasan kekuatan dan kemampuan yang ada, TNI AL yang mengemban fungsi pertahanan negara di laut sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, saat ini dinilai belum memiliki postur TNI AL yang ideal. Menyadari hal tersebut, TNI AL telah menyusun *blue print* pengembangan kekuatan hingga tahun 2013. Upaya ini tentu saja harus diimbangi dengan penyusunan strategi dan taktik yang sesuai sehingga terwujud sinkronisasi antara wadah, isi dan tata laku pertahanan di laut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalam konteks pertahanan negara sesuai dengan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) maka perlu disusun konsep operasi peperangan kepulauan (*archipelagic warfare*) yang merupakan kebutuhan dan keharusan untuk direalisasikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara di laut sebagai implementasi pelaksanaan Strategi Pertahanan Laut Nusantara.

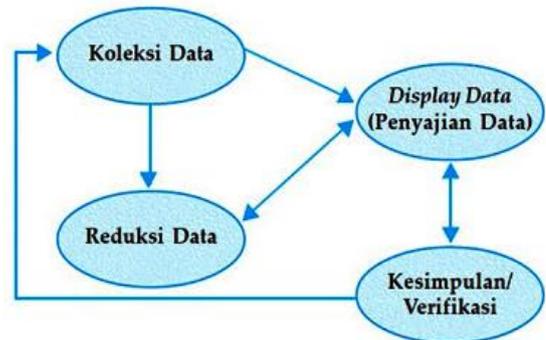
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang operasi

peperangan kepulauan sebagai strategi pertahanan laut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau *naturalistic* karena melakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Moleong (dalam Putri, Metiadini, Rahmat, & Ukhsan, 2020) menyebutkan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan (Marufah, Rahmat, & Widana, 2020; H. K. Rahmat, 2019; Hayatul Khairul Rahmat, Kasmi, & Kurniadi, 2020; Hayatul Khairul Rahmat, Madjid, & Pernanda, 2020; Hayatul Khairul Rahmat, Sari, et al., 2020). Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Ancaman Keamanan Maritim: Sebuah Kajian Perspektif Perkembangan Lingkungan Strategis

Memperhatikan situasi perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional dapat diantisipasi kemungkinan berbagai bentuk ancaman sebagai berikut.

Pertama, ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri dalam bentuk invasi militer dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional, merupakan suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan, khususnya sengketa perbatasan yang dapat berkembang menjadi perang terbatas. Di antara ribuan pulau, terdapat pulau-pulau terluar yang digunakan sebagai titik-titik batas terluar (*base point*) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara-negara tetangga. Dari 67 pulau-pulau kecil yang menjadi titik terluar batas wilayah, 12 di antaranya memiliki kerawanan atau berpotensi menjadi sumber sengketa dengan negara tetangga, yaitu: Pulau Rondo dengan India, Pulau Berhala dengan Malaysia, Pulau Nipah dengan Singapura, Pulau Sekatung dengan Vietnam, Pulau Marore, Miangas, Marampit dengan Filipina, Pulau Fanildo, Brass dan Fani dengan Palau, Pulau Batek dengan Timor Leste dan Pulau Dana dengan Australia. Posisi pulau-pulau yang

sedemikian strategis mengandung potensi ancaman maupun konflik, sehingga dibutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi agar kasus Pulau Sipadan-Ligitan tidak terulang kembali di kemudian hari.

Kedua, ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengakuan Internasional terhadap ALKI menuntut adanya jaminan keamanan dan keselamatan lalu lintas pelayaran di sepanjang ALKI. Apabila jaminan keamanan pelayaran dianggap belum memenuhi persyaratan, hal ini dapat mendorong kemungkinan hadirnya kekuatan Angkatan Laut asing di ALKI untuk mengamankan armada niaganya. Pada sisi lain, kerawanan juga dapat muncul akibat tidak dipatuhinya ketentuan oleh pengguna ALKI selama pelayaran di jalur tersebut.

Ketiga, ancaman terorisme. Banyaknya jalur lintas pelayaran dan keberadaan berbagai instalasi/ obyek vital strategis di laut, memungkinkan digunakannya jalur lintas dan obyek tersebut sebagai wahana oleh jaringan terorisme dalam menjalankan aksinya. Aksi teror ini dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstrim dalam negeri untuk mencapai tujuan politiknya, maupun aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki jaringan terorisme internasional.

Keempat, transnational crimes. Kejahatan lintas negara sudah merambah dunia, meliputi perompakan di laut, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya dan kejahatan ekonomi internasional. Jenis kejahatan tersebut selalu menggunakan teknologi tinggi yang sangat canggih sehingga membutuhkan kewaspadaan dan teknologi yang tinggi pula untuk

mendeteksi kehadiran dan eskalasi peningkatannya.

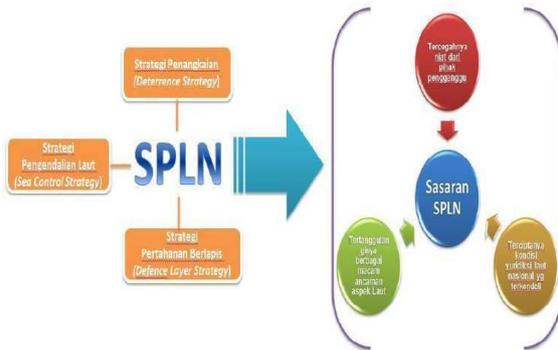
Kelima, ancaman dari dalam negeri. Ancaman yang datang dari dalam negeri dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, sebagai berikut.

- a) Kriminalitas yang berlatar belakang sosial ekonomi dan kerusuhan masyarakat yang ditimbulkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan kesenjangan sosial ekonomi.
- b) Kerusuhan masyarakat dengan kekerasan yang ditimbulkan oleh golongan tertentu untuk memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional.
- c) Pemberontakan bersenjata yang bersifat separatisme.
- d) Pemberontakan bersenjata yang ditimbulkan oleh golongan yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru.

Keenam, gangguan keamanan di laut. Masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta dorongan kepentingan ekonomi, berimplikasi pada timbulnya bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pengangkutan kayu ilegal, pengambilan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT) secara ilegal dan imigran gelap. Wilayah laut yang rawan terhadap gangguan keamanan dan pelanggaran hukum terutama di perairan sekitar Aceh, Selat Malaka, Selat Singapura, perairan Kalimantan Timur, perairan barat Sumatera, Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan perairan utara Papua.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara: Sebuah Konsepsi dan Implementasi

Adapun Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Konsepsi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, adapun Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) adalah sebagai berikut.

Pertama, strategi penangkalan (*deterrence strategy*) diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran di laut terutama di kawasan-kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi sumber konflik di masa mendatang, serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI AL.

Kedua, strategi pertahanan berlapis (*layer defence strategy*) diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan, dengan melibatkan kekuatan TNI AL bersama-sama seluruh komponen maritim yang didukung oleh kekuatan TNI AU.

Strategi Pertahanan berlapis diterapkan pada masa perang dalam bentuk operasi tempur laut yang

mempunyai sifat pertahanan ke depan (*forward defence concept*) dengan tetap memperhatikan konsep pergeseran medan juang.

Ketiga, strategi pengendalian laut (*sea control strategy*), diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah dan meniadakan berbagai bentuk ancaman aspek laut dari dalam negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk Operasi Laut Sehari-hari dan Operasi Siaga Tempur Laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU di perairan-perairan rawan selektif.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara ditata untuk menghadapi serangan dari luar dengan medan juang yang digambarkan pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Berdasarkan Gambar 4 di atas, Strategi Pertahanan Laut Nusantara ditata untuk menghadapi serangan dari luar dengan medan juang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Medan Pertahanan Penyanggah, yaitu daerah pertahanan Lapis I yang berada di luar garis batas ZEEI dan lapisan udara di atasnya.

- b) Medan Pertahanan Utama, yaitu daerah pertahanan Lapis II mulai dari batas luar laut teritorial sampai dengan ZEEI dan lapisan udara di atasnya.
- c) Daerah Perlawanan, yaitu daerah pertahanan Lapis III yang merupakan daerah perlawanan yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan pantai yang dibangun atas dasar sejumlah daerah pangkal perlawanan sebagai intinya.

Mencermati dan menyadari kondisi bangsa serta kemampuan kekuatan yang dimiliki TNI AL, maka TNI AL berupaya semaksimal untuk mampu bertempur di Lapis III (Daerah Perlawanan) dengan menggunakan Peperangan Kepulauan dengan memanfaatkan kondisi geografis Indonesia.

Prinsip Peperangan Kepulauan: Sebuah Kajian Komprehensif

Secara umum, prinsip peperangan kepulauan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar peperangan laut. Keunggulan konstelasi dan kondisi geografi negara kepulauan merupakan faktor pendukung yang dimanfaatkan untuk pengembangan strategi dan taktik pertempuran laut (Ridho & Sudirman, 2020). Titik berat prinsip peperangan kepulauan akan senantiasa bertumpu pada penguasaan data dan medan tempur yang mencakup konstelasi dan kondisi geografi maritim, hidro-oseanografis, meteorologi dan morfologi pantai, sehingga prinsip yang harus dipedomani adalah kombinasi dan keterpaduan sistem kesenjataan, pendadakan serta pengelabuan (Chapsos & Malcolm, 2017; Mustari, Supartono, & Barnas, 2018).

Pertama, Sinergitas Sistem Kesenjataan. Pada umumnya, negara kepulauan memiliki karakteristik geografi pantai dan kondisi hidro-oseanografi yang bervariasi dan dinamis. Susunan dan tata letak pulau dipisahkan oleh selat dan perairan yang kedalamannya sangat heterogen. Oleh karena itu, keuntungan ini harus dapat dimanfaatkan dengan melakukan kombinasi dan memadukan sistem kesenjataan agar mampu memberikan dampak penghancuran yang signifikan. Pada corong strategis, selat dan perairan yang masuk dalam kategori laut dalam serta mampu dijangkau oleh sistem pertahanan pantai, maka kombinasi sistem kesenjataan peperangan AKPA, AKS, Pertahanan pantai dan Serangan udara merupakan pilihan yang menguntungkan. Sedangkan pada corong strategis, selat dan perairan yang masuk dalam kategori laut dangkal, maka kombinasi sistem kesenjataan peperangan AKPA, AKS, Peranjauan, Pertahanan pantai dan Serangan udara akan memberikan dampak yang efektif.

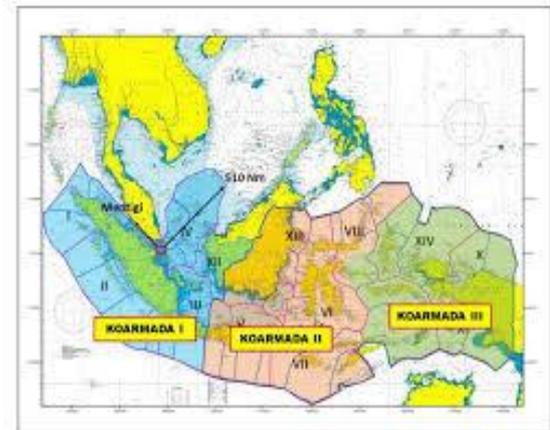
Kedua, Melokalisir Mandala Operasi. Bertujuan untuk mempersempit dan membatasi ruang gerak musuh pada wilayah perairan yang memberikan keuntungan strategis dan taktis bagi kekuatan sendiri. Disamping itu, prinsip ini akan memudahkan untuk memusatkan kekuatan sendiri dalam menghadapi kekuatan lawan, sehingga komando dan pengendalian kekuatan dapat dilakukan dengan baik.

Ketiga, Pendadakan. Hampir seluruh strategi dan taktik peperangan, faktor pendadakan merupakan hal yang penting dalam memenangkan suatu pertempuran. Prinsip pendadakan dalam peperangan kepulauan dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografis kepulauan Indonesia

dimaksudkan untuk memaksa musuh tidak sempat mengembangkan taktik peperangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga musuh selalu pada kondisi yang tidak siap untuk melaksanakan peperangan.

Keempat, Pengelabuhan. Prinsip pengelabuhan dalam peperangan kepulauan dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografis kepulauan Indonesia dimaksudkan untuk mengelabui musuh agar cara bertindak yang dilaksanakan musuh selalu dalam kondisi tidak menentu, dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan banyaknya pulau-pulau sebagai tempat persembunyian, sehingga akan membuat dugaan musuh tidak benar sedangkan keleluasaan kita dalam menyiapkan aksi serangan setiap saat sesuai dengan datangnya ancaman akan lebih optimal.

Dari analisa konstelasi dan kondisi geografis di atas, maka dapat ditemukan adanya karakteristik geografis yang dapat dimanfaatkan dalam penggunaan kekuatan laut. Berdasarkan karakteristik geografis tersebut maka wilayah perairan Indonesia dapat ditentukan medan operasi laut yang menjadi pusat konsentrasi pengerahan kekuatan laut untuk mencegah musuh memasuki perairan kepulauan maupun perairan pedalaman. Pembagian Mandala Operasi laut berdasarkan analisa dapat dijelaskan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Pembagian Mandala Operasi Laut

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 5 di atas.

a) Mandala Operasi Laut I

Merupakan ruang wilayah/perairan yang meliputi perairan Laut Natuna, Selat Singapura sampai dengan Selat Malaka bagian Utara, perairan Barat Sumatera sampai dengan perairan Selatan Jawa Barat, Selat Karimata sampai dengan Selat Sunda (ALKI-I). Berdasarkan analisa geografi Indonesia maka wilayah Mandala Operasi Laut I dapat ditentukan beberapa corong strategis yang kemungkinan besar dapat dimanfaatkan oleh lawan untuk menerobos masuk ke perairan kepulauan Indonesia. Pada corong-corong strategis inilah ditetapkan sebagai daerah pertempuran bagi kekuatan kesenjataan TNI AL guna mencegah masuknya kekuatan lawan. Daerah pertempuran pada Mandala Operasi I adalah daerah pertempuran di Perairan Natuna, daerah pertempuran di Perairan Selat Malaka sampai dengan Selat Singapura, dan daerah pertempuran di Perairan Selat Sunda.

b) Mandala Operasi Laut II

Wilayah/ perairan Mandala Operasi Laut II meliputi perairan Selatan dan Utara Pulau Jawa, Laut Sulawesi, Selat Makassar, perairan Nusa Tenggara Barat, Perairan Selat Lombok

(ALKI-II). Berdasarkan hasil analisa, pada wilayah ini telah ditetapkan beberapa corong yang memiliki nilai strategis yang kemungkinan besar dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan sebagai alur masuk ke perairan kepulauan Indonesia. Konsentrasi kekuatan lebih dititikberatkan pada corong-corong strategis guna mencegah lawan masuk ke perairan kepulauan, sehingga corong strategis yang ada dapat ditetapkan sebagai daerah pertempuran. Penetapan daerah pertempuran di Mandala Operasi II adalah daerah pertempuran di Laut Sulawesi sampai dengan perairan Utara Selat Makassar dan daerah pertempuran di perairan Selat Lombok.

c) Mandala Operasi Laut III
Meliputi perairan Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Flores, Laut Seram, Perairan Selatan Nusa Tenggara Timur termasuk Laut Banda, Selat Wetar dan Selat Ombai (ALKI-III), Laut Aru, Perairan Utara Papua. Dari hasil analisis geografi Indonesia dan berdasarkan prediksi arah datangnya ancaman, pada Medan Operasi Laut III dapat ditetapkan lima corong strategis yang juga merupakan daerah pertempuran di Laut Maluku, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, di Laut Sawu, dan di Selat Wetar dan Selat Ombai.

Kondisi geografis dari ketiga Mandala Operasi Laut secara umum dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan taktis saat berlangsungnya pertempuran di mandala-mandala tersebut selain itu dapat juga digunakan sebagai pos pengamat darat untuk memantau gerakan unsur laut asing yang mencurigakan, sekaligus pos-pos untuk menghancurkan sasaran di laut dengan senjata yang memadai bila situasi taktis memungkinkan.

Contohnya beberapa pulau kecil yang berada di tengah selat-selat strategis atau tanjung-tanjung yang menjorok ke laut. Sedangkan kondisi meteorologi di ketiga Mandala Operasi tersebut secara umum perkembangannya masih sesuai dengan perubahan musim dalam periode waktu tertentu yang telah dapat diprediksikan sebelumnya. Penggunaan kekuatan yang tepat akan sangat berpengaruh pada pencapaian keberhasilan dalam suatu pertempuran, terutama jika dikaitkan dengan pemahaman tentang mandala operasi maupun daerah yang akan digunakan sebagai medan/daerah pertempuran. Strategi yang dianggap tepat untuk medan kepulauan adalah strategi *Fleet in Being* dimana dengan jumlah yang relatif kecil diharapkan dapat menghadapi kekuatan yang lebih besar karena mampu memanfaatkan kondisi geografis perairan kepulauan. Sedangkan strategi *Decisive Battle* baru akan digunakan jika kekuatan lawan jelas lebih kecil dan hal ini dapat diterapkan pada seluruh perairan Indonesia, tidak dibatasi hanya pada perairan yang memiliki kondisi geografi kepulauan. Pembahasan secara umum dalam hal ini hanya yang berkaitan dengan penggunaan strategi dan taktik yang dianggap tepat untuk medan atau daerah pertempuran di perairan kepulauan atau dekat dengan pulau-pulau, yaitu strategi Armada Siaga (*Fleet in Being*) serta beberapa taktik seperti *Hit and Run*, *Lure and Destroy*, *Camouflage*, *Concealment and Deception (CCD)*, *Wolfpack/* Kelompok Serigala dan *Chess Board* serta *Attrition*, *Interdiction*, *Harrasment and Delayed (Mining Ops)*.

Secara umum, peperangan kepulauan didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah yuridiksi nasional Indonesia dengan memanfaatkan serta mensinergikan karakteristik geografi dan hidro-

oseanografi negara kepulauan dengan teknologi kesenjataan yang tepat guna menciptakan keunggulan bagi kekuatan sendiri (Prabowo, 2013). Dalam konteks peperangan laut, maka gelar operasi tempur laut diarahkan untuk menerapkan taktik peperangan kepulauan yang sesuai dengan kondisi geografi maritim, hidro-oseanografi perairan dan meteorologi agar mampu mewujudkan pengendalian laut dan corong-corong strategis secara mutlak (Bradford, 2005).

Medan Peperangan Kepulauan.

Medan peperangan kepulauan adalah Daerah Perlawanan yang merupakan pertahanan lapis ke III dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dengan memanfaatkan semaksimal mungkin ruang darat, udara dan laut sebagai media pertahanan. Dalam perspektif pertahanan negara di laut, maka medan peperangan kepulauan terdiri dari medan pencegahan, medan peperangan utama, dan medan peperangan penghancuran.

a) Medan pencegahan merupakan ruang wilayah yang terbentang mulai dari batas terluar perairan teritorial ke arah laut lepas sampai dengan 12 mil (Zona Tambahan). Medan peperangan ini berfungsi sebagai medan peperangan lapis pertama mengandalkan kekuatan patroli udara maritim dan menggunakan kekuatan pesud intai strategis dari TNI AU yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Pada medan pencegahan ini lebih dititik beratkan kepada pelaksanaan fungsi intelijen dan pengintaian dari pesud intai yang ada. Dengan ini diharapkan mampu mendapatkan informasi yang akurat tentang arah kemungkinan datangnya lawan.

b) Medan peperangan utama merupakan ruang wilayah yang

terbentang dari batas terluar teritorial ke arah dalam sampai dengan perairan kepulauan yang dipersiapkan sebagai medan peperangan utama. Medan peperangan utama berfungsi sebagai medan peperangan lapis kedua sekaligus medan utama peperangan kepulauan. Pengendalian laut secara absolut di wilayah ini harus dapat dilaksanakan. Diharapkan ancaman yang mampu menerobos medan pencegahan akan dieliminir atau dihancurkan di medan peperangan utama.

c) Medan peperangan penghancuran merupakan ruang wilayah yang berada di perairan pedalaman. Medan peperangan penghancuran berfungsi sebagai medan peperangan lapis terakhir yang bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa ancaman secara absolut. Kekuatan sistim pertahanan pantai dan kapal-kapal cepat sangat menentukan keberhasilan penguasaan medan penghancuran

Dalam penyelenggaraan Peperangan Kepulauan, Mandala Operasi Laut disiapkan untuk melaksanakan peperangan kepulauan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin ruang darat, udara dan laut sebagai media pertahanan. Dalam perspektif pertahanan negara di laut, mandala peperangan kepulauan terdiri dari Mandala Operasi Laut I, II dan III yang didalamnya dibagi menjadi sepuluh daerah pertempuran. pada corong-corong strategis inilah ditetapkan sebagai Medan Pertempuran bagi kekuatan kesenjataan TNI AL guna mencegah masuknya kekuatan lawan.

SIMPULAN

Peperangan kepulauan didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah yuridiksi nasional Indonesia dengan

memanfaatkan serta mensinergikan karakteristik geografi dan hidro-oseanografi negara kepulauan dengan teknologi kesenjataan yang tepat guna menciptakan keunggulan bagi kekuatan sendiri. Dalam konteks peperangan laut, maka gelar operasi tempur laut diarahkan untuk menerapkan taktik peperangan kepulauan yang sesuai dengan kondisi geografi maritim, hidro-oseanografi perairan dan meteorologi agar mampu mewujudkan pengendalian laut dan corong-corong strategis secara mutlak.

Untuk memaksimalkan operasi penyelenggaraan peperangan kepulauan dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dengan memanfaatkan ruang darat, udara dan laut sebagai media pertahanan. Dalam perspektif pertahanan negara di laut, dengan medan peperangan kepulauan yang terdiri dari medan pencegahan, medan peperangan utama, dan medan peperangan penghancuran.

DAFTAR PUSTAKA

Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>

Bradford, L. J. F. (2005). The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*, 58(3), 63-86.

Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159-164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>

Chapsos, I., & Malcolm, J. A. (2017). Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda? *Marine Policy*, 76, 178-184. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.033>

Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(Juli), 19.

Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi modal sebagai dampak kejahatan siber pada generasi millennial di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-201. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.191-201>

Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 17-36. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/285>

Prabowo, E. E. (2013). Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), 118-129. <https://doi.org/10.22146/jkn.6776>

Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 257-271. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i2.257-271>

Rahman, Z. (2015). Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. *RechtsVinding*, 10(2), 1-9.

Rahmat, H. K. (2019). Implementasi strategi layanan bimbingan dan konseling komprehensif bagi siswa tunanetra di MTs Yaketunis Yogyakarta. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam Vol.*, 16(1), 37-46.

Rahmat, Hayatul Khairul, Kasmi, K., & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi antara Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(1), 455-461. Retrieved from <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/440>

Rahmat, Hayatul Khairul, Madjid, M. A., & Pernanda, S. (2020). KOLEKTIVITAS SEBAGAI SISTEM NILAI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI INDONESIA: SUATU STUDI REFLEKTIF. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik*

PKn, 7(2), 83-95.

Rahmat, Hayatul Khairul, Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., ... Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2), 70-75. <https://doi.org/10.33172/jmb.v6i2.623>

Ridho, M., & Sudirman, A. (2020). Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 165-182.

Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.